

KAJIAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

(Research on Factors that have Effect Towards Efforts in the Children Protection)

SURADI

Abstract Problems of children currently need serious attention regarding to the tendency of those children become victims of mistreatment, being exploited and ignored. These tendencies can happen to a family that has high level of economical and social status as well as to one that has low level economical and social status. The ambition towards career of parents of a welfare family and the limited access to meet the basic social need of poor family have lead this situation to the ignorance of children's rights of being survive, growing up, protection and participation. The parents unconsciously have ignored, exploited, and mistreated their children for economical, social, or psychological purpose. An explorative research has observed various situation and condition as well as factors that have affected towards mistreatment, ignorance, and exploitation of children by their parents.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Lembaga perlindungan anak

1. PENDAHULUAN

Anak perlu dipahami sebagai penerus dan pemilik masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup secara layak. Kehidupan yang layak dimaksud, yaitu tata kehidupan dan penghidupan anak yang memungkinkan mereka dapat memenuhi berbagai jenis kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, mental spiritual, emosional, intelektual dan sosial. Selain itu, kehidupan yang layak juga dalam arti adanya kesempatan pada anak untuk mengembangkan segenap potensinya secara optimal, sehingga

mereka menjadi anak yang cerdas, kreatif dan mandiri.

Pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar hak-haknya dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan perilaku tidak manusiawi lainnya, dan kurangnya perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Bahkan kasus kriminal dengan korban anak-anak, akhir-akhir ini cukup mencemaskan, karena menunjukkan eskalasi yang cukup mencolok. Beberapa kasus tersebut, seperti penganiayaan, perkosaan, sodomi, pengguguran dan pembunuhan.

Dalam "A Country Strategy for Children and Women 2001-2005; The Government of Indonesia and Unicef", dikemukakan data pekerja anak sebanyak 1,8 juta, anak jalanan sebanyak 50.000 dan anak yang terlibat pelacuran sebanyak 40.000-70.000 anak dengan prioritas masalah berupa : perlakuan salah, kelemahan peraturan perundang-undangan perlindungan, penegakan hukum dan sanksi.

Mengingat besarnya jumlah anak yang mengalami keterlantaran tersebut baik secara fisik, mental dan sosial serta dampak negatifnya, maka perlu dicermati, disikapi dan ditindak lanjuti. Dalam kerangka itu penelitian eksploratif tentang faktor-faktor berpengaruh terhadap upaya perlindungan anak ini dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali pemikiran pekerja sosial kecamatan dan petugas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) (1) dalam mengenali jenis permasalahan sosial anak dan faktor-faktor penyebabnya (2) kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat, (3) usaha-usaha perlindungan anak yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah, (4) jenis kebutuhan/ pelayanan dan sumber-sumber yang tersedia dalam upaya perlindungan anak, dan (5) faktor-faktor pendukung, penghambat dan peluang dalam perlindungan anak. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bagi penyusunan kebijakan dan program perlindungan anak pada unit teknis di lingkungan Departemen Sosial.

1.1 Tinjauan Konseptual

Anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya

telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sehingga menjadi anak yang cerdas, kreatif dan mandiri. Karena itu, sebagai lembaga pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak, keluarga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan kondisi tersebut.

Permasalahannya, dewasa ini setiap keluarga tidak terlepas dari terpaan gelombang transformasi yang membawa dampak bagi konsep sebuah keluarga dan pelaksanaan fungsi di dalamnya. Konsep keluarga yang semula merupakan kesatuan sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang terbentuk melalui perkawinan, telah mengalami perubahan. Unsur ayah, ibu, anak dan perkawinan tidak selalu terpenuhi dalam konsep keluarga dewasa ini (Holil Soelaiman, 1994). Berubahnya struktur keluarga, akan mempengaruhi peran dan fungsi keluarga, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan anak, baik fisik, mental spiritual dan sosial.

Selain itu pengaruh yang dirasakan oleh keluarga dengan terjadinya perubahan sosial, ekonomi dan budaya dalam kehidupan global dewasa ini, menurut Dadang Hawari (1994, hal. 20-32), hubungan kekeluargaan yang semula kuat dan erat (*family tight*), cenderung longgar dan rapuh (*family loose*) dan ambisi karier dan materi yang tidak terkendali dan sering bersifat "obsesif kompulsif", telah mengganggu hubungan interpersonal. Di pihak lain, tidak sedikit keluarga yang secara

ekonomi mengalami keterbatasan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial dasar bagi anak-anak mereka. Tidak sedikit dari keluarga ini dengan terpaksa tidak menyekolahkan anaknya pada jenjang wajib belajar. Bahkan, tidak sedikit pula yang "terpaksa" melibatkan anak-anak mereka untuk mencari nafkah.

Dengan demikian, situasi sosial, psikologis maupun ekonomis pada kedua jenis keluarga tersebut, memungkinkan terjadinya penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah pada anak-anak mereka, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis. Hal ini akan memberikan pengaruh negatif terhadap tumbuh kembang anak tersebut, yaitu terjadinya kelambatan pada semua fungsi jasmaniah dan perkembangan intelegensi serta emosi dan kelambaan psikis (Saparinah Sadli, 1980; S. Budhisantoso, 1994 hal.33-37; Kartini Kartono, 1982, Hal.33).

Besarnya pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan kreativitas dan kemandirian anak ini dijelaskan oleh S.C. Munandar (1995) bahwa anak dapat tumbuh dengan kecerdasan, kreativitas dan kemandirian; kesemuanya itu sangat tergantung bagaimana suatu keluarga dan lingkungan bermain anak mampu melaksanakan peranan dan fungsinya secara optimal. Lebih lanjut Kartini Kartono (1982, hal.52) mengemukakan bahwa perkembangan yang sehat pada anak akan berlangsung, jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan profesionalitas kodrati anak bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuan anak. Sebaliknya kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat, apabila segenap pengaruh

lingkungan merusak bahkan melumpuhkan potensi psikologis anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai situasi, kondisi dan faktor-faktor terkait dengan penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah pada anak terutama oleh keluarganya. Terkait dengan itu, metode penelitian yang dipilih adalah metode eksploratif, dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih, karena sepengetahuan peneliti belum pernah ada kajian sebelumnya mengenai faktor-faktor terkait dengan upaya perlindungan anak.

Penelitian ini dilakukan di 11 propinsi, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai faktor-faktor berpengaruh dalam upaya perlindungan anak ini, informan yang dipandang kompetensi adalah pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pekerja Sosial Kecamatan (PSK). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka sebagai pedoman wawancara dan studi dokumentasi.

Data dan Informasi yang telah terkumpul, diolah secara manual dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisa secara

kualitatif, dalam bentuk uraian yang menjelaskan situasi, kondisi dan faktor-faktor terkait upaya perlindungan bagi anak yang cenderung menjadi korban perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Keluarga

Sumber data untuk mengetahui karakteristik keluarga ini adalah pekerja sosial kecamatan setempat. Kondisi keluarga dicermati dari bentuk keluarga dan tingkat pendidikan orang tua pada umumnya. Pencermatan terhadap kedua aspek ini penting, karena terkait langsung dengan permasalahan ketelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa anak yang mengalami masalah penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah, pada umumnya mereka berasal dari keluarga utuh. Mereka masih memiliki ayah dan ibu yang tinggal dalam satu rumah sebagai sebuah keluarga. Sebaliknya, sebagian kecil yang berasal dari keluarga dengan kepala rumah tangga ibu (janda), berasal dari orangtua duda dan orangtua perwalian.

Terjadinya penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak dapat terjadi disebabkan oleh buruknya interaksi sosial antar anggota keluarga. Dengan demikian, berdasarkan studi ini, ketuhan suatu keluarga bukan suatu kondisi yang dapat menjamin tercukupinya berbagai

jenis kebutuhan dan hak-hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Holil Soelaiman (1994 : 8), bahwa perubahan sosial budaya membawa dampak yang kurang menguntungkan pada keluarga, seperti tempat bekerja yang jauh dari rumah, berpisahnya suami dengan istri, orang tua dengan anak dalam waktu yang lama setiap harinya. Kondisi ini menyebabkan komunikasi dan interaksi sosial antara sesama anggota keluarga menjadi kurang intens.

Kemudian dicermati dari tingkat pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut informan pada umumnya orang tua memiliki tingkat pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan orangtua ini secara ekonomis menempatkan mereka pada kelompok keluarga miskin; dan secara sosial memperlihatkan pemahaman terhadap anak (menyangkut masalah, kebutuhan dan hak-hak anak) sangat rendah. Dampak lebih lanjut dari kondisi ini, kebutuhan dan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar.

3.2 Kondisi Lingkungan Masyarakat

Seperti halnya pencermatan tentang kondisi keluarga, sumber data dalam upaya mengetahui kondisi lingkungan masyarakat adalah pekerja sosial kecamatan. Asumsi yang mendasari pentingnya mengetahui karakteristik lingkungan masyarakat ini, bahwa masalah anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan lingkungan masyarakatnya. Kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, ikut berperan dalam menciptakan atau menghilangkan masalah anak. Kebiasaan yang berperan

menciptakan masalah anak, adalah lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku anggotanya. Atau masyarakat mempunyai kebiasaan yang "permissif" terhadap perilaku anggotanya yang tidak sesuai dengan standard sosial.

Hubungan antar warga/keluarga dalam lingkungan masyarakat dimana terdapat masalah penelantaran anak, pada umumnya tingkat kepedulian sosialnya rendah. Situasi lingkungan sosial yang diwarnai oleh disharmonisasi tersebut memang tidak memberikan iklim yang memungkinkan anak dapat tercukupi kebutuhan sosial dasarnya. Organisasi sosial yang adapun pelayanannya belum menjangkau anak di lingkungannya karena adanya berbagai keterbatasan, seperti penyediaan SDM (kuantitas maupun kualitas) dan fasilitas kerja. Bahkan terdapat orsos yang kurang berfungsi karena lemahnya manajemen orsos tersebut.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa status sosial ekonomi keluarga anak bermasalah penelantaran, menunjukkan status yang rendah. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan keluarga dalam penyediaan perumahan. Sebagian besar keluarga dimana terdapat masalah penelantaran anak, kondisi perumahannya adalah kurang atau tidak layak huni. Perumahan yang tidak layak huni seperti padat, kumuh, jorok atau disebut slum fisik; biasanya diikuti oleh perilaku warganya seperti masa bodoh, tidak teratur, tidak ada tanggung jawab dan bahkan cenderung untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan standard sosial yang berlaku umum (slum sosial). Dengan demikian, kelihatan ada korelasi

positif antara masalah penelantaran anak, status sosial ekonomi dengan kondisi perumahan.

Beberapa fasilitas sosial atau fasilitas umum cukup tersedia di masyarakat dimana terdapat berbagai bentuk permasalahan anak. Fasum/fasos tersebut antara lain panti asuhan anak, gerakan orangtua asuh dan sekolah. Namun demikian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa keberadaan fasum/fasos (dalam bentuk lembaga sosial) masih sangat terbatas daya jangkau dan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak yang mengalami masalah sosial.

4. KARAKTERISTIK MASALAH

4.1 Keadaan dan Masalah

Transformasi sosial pada kenyataannya, disamping memberikan keuntungan juga menimbulkan permasalahan sosial. Salah satunya adalah goyahnya peran dan fungsi lembaga keluarga sebagai lingkungan sosial pertama dan utama bagi anak. Gaya hidup dan ambisi orang tua untuk mencapai karir, sering mengabaikan hak-hak anaknya untuk tumbuh kembang dengan baik. Disamping itu, kemiskinan juga sebagai kondisi yang menyebabkan peran dan fungsi lembaga keluarga tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Beberapa kajian sebelumnya, menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan buruknya hubungan sosial dalam keluarga merupakan faktor dasar yang menyebabkan terjadinya masalah anak. Masalah anak yang terkait dengan

upaya perlindungan anak dapat dikelompokkan kedalam 3 jenis yakni (1) penelantaran, (2) perlakuan salah dan (3) eksploitasi.

Hasil kajian yang dilakukan di 11 propinsi, menunjukkan bahwa jenis masalah anak yang sangat menonjol adalah penelantaran anak (11 propinsi), eksploitasi anak (4 propinsi) dan perlakuan salah terhadap anak (2 propinsi). Walaupun kajian ini tidak berhasil menyajikan data kuantitatif pada masing-masing jenis masalah anak, namun cukup memberikan gambaran bahwa masalah anak telah menyebar di semua propinsi sampel ($\pm 1/3$ dari jumlah propinsi di Indonesia). Informasi ini cukup menjadi alasan, bahwa program perlindungan anak perlu mendapatkan prioritas, dan menjadi salah satu strategi pembangunan nasional (*Children in Development*).

Fenomena anak jalanan, anak nakal dan penyalahgunaan obat terlarang; besar kemungkinan adalah produk dari ketiga jenis masalah anak tersebut. Anak-anak menjadi kehilangan berbagai haknya seperti: (1) hak perawatan, asuhan dan bimbingan, (2) hak mengembangkan kemampuan, (3) hak pemeliharaan dan perlindungan. Kondisi seperti ini untuk jangka panjang akan menjadi gangguan bagi kelangsungan proses pembangunan, terutama terkait dengan ketersediaan SDM yang berkualitas.

4.2 Faktor Penyebab dan Akibat terjadinya masalah

Faktor Penyebab terjadinya masalah

Terjadinya penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah

terhadap anak dapat dicermati dari dua factor, yaitu factor ekonomis dan factor psiko-sosial.

1. Faktor ekonomis

Kemiskinan menyebabkan terbatasnya kesanggupan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini mendorong anak untuk ikut orang tuanya sebagai pencari nafkah. Kesibukan sebagai pencari nafkah ini menyebabkan terabaikannya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai fase-fase perkembangannya.

2. Faktor psiko-sosial

Hubungan sosial yang buruk antara suami-isteri merupakan situasi sosial yang tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak. Pada beberapa kajian sebelumnya dikemukakan, bahwa anak seringkali menjadi sasaran pelampiasan orang tua ketika terjadi konflik. Hasil kajian berhasil mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab terjadinya masalah anak dari aspek hubungan sosial, yaitu: perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua, yatim/piatu, kawin muda, orang tua terlalu sibuk, lingkungan pergaulan, disfungsi keluarga dan lahir di luar nikah.

Meskipun kajian ini tidak dapat menyajikan data kuantitatif, informasi ini cukup memberikan gambaran bahwa masalah keterlantaran anak terjadi karena faktor ekonomi (kemiskinan keluarga) dan buruknya hubungan sosial antara anak dengan keluarga dan dengan lingkungan sosialnya.

4.3 Akibat terjadinya masalah bagi anak

Adapun akibat dari penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak menurut informan mencakup tiga aspek berikut:

a. Perkembangan fisik-organis

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak. Terbatasnya keluarga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama kecukupan pangan yang bergizi, akan memberikan pengaruh langsung terhadap kecukupan gizi anak. Ketidakcukupan asupan makanan bergizi ini menyebabkan rendahnya kecerdasan anak, terganggunya pertumbuhan fisik anak, dan bahkan dapat mengakibatkan terjadinya kecacatan anak.

b. Perkembangan mental anak

Situasi psiko-sosial keluarga yang tidak kondusif akan mempengaruhi perkembangan mental anak. Pola relasi antara anak yang kering dari kasih sayang dan perhatian orang tua, dapat mengakibatkan anak menampilkan perilaku kurang percaya diri, malas, masa bodoh dan tidak teratur. Akumulasi antara aspek psiko-sosial dan ekonomi keluarga serta aspek kepribadian anak, merupakan situasi yang mendorong anak hidup di jalanan (sebagai anak jalanan).

c. Perkembangan sosial

Perkembangan sosial, terutama pemenuhan kebutuhan belajar anak,

mengalami hambatan disebabkan status ekonomi keluarga yang rendah. Keluarga tidak mampu menjangkau biaya pendidikan yang cukup tinggi, sehingga anak-anak mereka tidak mampu menempuh pendidikan dasar. Tidak sedikit anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah (drop out), sehingga tidak dapat menamatkan SD.

Namun demikian, gangguan perkembangan sosial juga dapat terjadi pada keluarga dengan status ekonomi tinggi. Tidak optimalnya proses belajar sosial di dalam keluarga, disebabkan adanya gangguan hubungan sosial dalam keluarga, menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan sosial anak. Karenanya anak menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan standard sosial yang berlaku di masyarakat.

Terdapat dua gejala perilaku yang diperlihatkan anak, sebagai akibat dari penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak, yaitu :

1. Perilaku agresif

Bentuk-bentuk perilaku agresif antara lain anak menjadi nakal dan liar. Bahkan muncul perilaku sosialnya seperti mencuri, merusak dan melawan orang tua, suku berkelahi dengan temannya dan lain-lain.

2. Perilaku regresif

Bentuk-bentuk perilaku regresif yang dapat diamati antara lain anak menjadi labil, pemalu, acuh tak acuh, tertekan dan apatis. Anak tidak percaya diri untuk menyampaikan keinginannya, dan cenderung lekas menyerah sebelum berusaha.

Baik perilaku yang bersifat agresif maupun regresif, merupakan bentuk-

bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan kondisi anak yang diharapkan, yakni anak yang cerdas, kreatif, mandiri, setia kawan dan berakhlak mulia. Kondisi anak dengan sifat-sifat perilaku agresif maupun regresif tersebut mencerminkan buruknya kualitas SDM masa depan bagi keberlanjutan pembangunan.

4.4 Jenis Kebutuhan yang diperlukan

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa terdapat tiga jenis masalah anak terkait dengan upaya perlindungan, yaitu (1) penelantaran, (2) eksploitasi, dan (3) perlakuan salah. Adapun jenis-jenis masalah tersebut menggambarkan adanya gangguan dan hambatan pada aspek fisik-organik, mental dan kepribadian, serta sosial anak. Sehubungan dengan itu, maka menurut informan jenis kebutuhan yang diperlukan oleh anak adalah:

1. Kebutuhan fisik-organik

Kebutuhan fisik-organik adalah jenis kebutuhan yang terkait langsung dengan pertumbuhan fisik organik anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan seperti: sandang, tempat tinggal, makanan dan kesehatan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan vital bagi anak karena menentukan kelangsungan hidup maupun kualitas hidup anak.

2. Kebutuhan belajar

Kebutuhan belajar adalah jenis kebutuhan yang terkait langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan adalah bea siswa, sarana pendidikan atau paket bantuan sekolah dan bimbingan budi pekerti.

3. Kebutuhan sosial-psikologis

Kebutuhan psikologis adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan psikis anak, jenis kebutuhan tersebut adalah rasa aman, kasih sayang dan diperhatikan. Terhambatnya pemenuhan kebutuhan psikologis/mental ini menyebabkan anak terhambat perkembangan psikis/mentalnya, atau perkembangannya tidak wajar.

4. Kebutuhan religius

Kebutuhan religius adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan rohani anak. Dalam proses selanjutnya terpenuhinya kebutuhan rohani ini akan memperkuat ketahanan mental anak, dan mengantarkan anak sebagai manusia yang berbudi pekerti (jujur, tidak sombong, rajin, dll).

5. Kebutuhan pengembangan keterampilan

Kebutuhan ini adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan pengembangan bakat dan kemampuan anak. Kebutuhan ini diperlukan dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi anak sebagai modal hidup mandiri.

6. Kebutuhan sosial

Kebutuhan sosial adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan pengembangan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga ataupun masyarakat (teman sebayanya). Jenis kebutuhan sosial seperti kebutuhan untuk diterima sebagai anggota kelompok atau menerima orang lain sebagai anggota kelompok, bermain bersama, kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap temannya.

4.5 Jenis Pelayanan dan Sistem Sumber

Sehubungan dengan jenis-jenis kebutuhan anak tersebut, maka menurut informan diperlukan berbagai jenis pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan

Kebutuhan fisik dan kesehatan merupakan kebutuhan primer, karena terkait langsung dengan kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembangnya. Bagi keluarga miskin, pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan ini merupakan permasalahan, karena adanya keterbatasan secara ekonomis.

2. Bimbingan sosial, belajar, psiko-sosial dan religius

Jenis-jenis kebutuhan ini terkait langsung dengan perkembangan kepribadian, kreativitas, intelegensi dan kemandirian anak. Baik pada keluarga kaya, maupun pada keluarga miskin kemungkinan dapat terjadi gangguan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

3. Pelatihan ketrampilan

Kebutuhan ini merupakan jenis kebutuhan pengembangan bagi anak yang telah memasuki usia remaja. Keterampilan ini bisa sebagai pengisi waktu luang, atau pun sebagai sumber nafkah yang layak.

Adapun system sumber yang dapat memobilisasi untuk memenuhi kebutuhan anak menurut informan adalah :

1. Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSK) yang ada di masyarakat seperti PKK, LKMD, Pesantren dan LSM

Keberadaan organisasi sosial dan perkumpulan sosial lokal dalam upaya perlindungan anak dapat dipandang sebagai salah satu sumber yang sangat potensial. Mengingat bahwa misi dan visi suatu orsos berorientasi pada UKS termasuk didalamnya upaya memberikan perlindungan anak.

Melalui kajian ini diperoleh sebanyak 23 orsos yang memberikan pelayanan perlindungan terhadap anak yang mengalami masalah. Dari 23 orsos tersebut sebagian besar menggunakan pendekatan non panti atau berbasis masyarakat. Berbagai jenis pelayanan yang diberikan dalam upaya perlindungan anak antara lain: pelayanan terkait dengan kelangsungan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, pengembangan kapasitas mental dan sosial, pengembangan ekonomis dan ketrampilan.

Informasi tersebut cukup memberikan gambaran, bahwa dalam upaya perlindungan anak telah tersedia sumber dan potensi kesos. Persoalannya sekarang bagaimana sumber dan potensi kesos tersebut mampu memberikan pelayanan secara profesional. Sehingga keberadaannya akan memberikan sumbangan yang nyata dan bermakna dalam upaya perlindungan anak khususnya dan UKA pada umumnya. Namun demikian kiranya masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui kinerja orsos dan kontribusinya dalam UKA.

2. Instansi pemerintah daerah setempat secara lintas sektoral

Keberadaan Pemerintah daerah merupakan bagian tak terpisahkan

dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan UKA, khususnya upaya memberikan perlindungan bagi anak bermasalah. Kebijakan pemerintah pusat dalam UU No. 22/2000 merupakan landasan operasional bagi pemda untuk menyelenggarakan upaya perlindungan anak.

Informasi menarik dalam kajian ini, diperolehnya sejumlah 10 instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara langsung mengelola program perlindungan anak. Instansi tersebut antara lain Dinas Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan, Pembangunan Desa, Pendidikan Nasional, Bappeda dan Agama. Informasi ini sekaligus menunjukkan begitu besarnya komitmen instansi sektoral di tingkat pemda terhadap upaya perlindungan anak. Dua pendekatan yang digunakan dalam rangka pemberian pelayanan, yaitu sistem panti dan non panti. Dari kedua pendekatan tersebut, non panti merupakan pendekatan yang banyak dipilih oleh instansi di tingkat pemda.

Adapun bentuk kegiatannya adalah memberikan pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, bimbingan mental, pengembangan usaha, santunan sosial dan rehabilitasi sosial. Berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan instansi sektoral di tingkat Pemda tersebut akan memberikan sumbangan yang nyata terhadap upaya perlindungan anak, apabila dilakukan koordinasi yang mantap dengan instansi sosial setempat. Koordinasi tersebut meliputi penentuan sasaran (kriteria), proses pelayanan (strategi dan pendekatan), penyiapan SDM dan penyediaan sarana dan prasarana. Dengan adanya koordinasi, maka tidak akan terjadi tumpang tindih

pelaksanaan tupoksi dan sumberdaya dapat diarahkan secara efektif.

Di samping kedua system sumber tersebut, satu lagi system sumber yang perlu diikutsertakan dalam upaya perlindungan anak, yaitu Dunia Usaha yang dalam penelitian ini belum dijangkau. Dunia Usaha epulu didorong untuk peduli terhadap permasalahan anak sebagai bagian dari investasi Dunia Usaha terhadap pembangunan bangsa di masa depan.

5. FAKTOR PENGHAMBAT, PENDUKUNG DAN PELUANG

5.1. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang dirasakan masih cukup menghambat upaya perlindungan anak adalah:

a. Keluarga

Faktor penghambat yang berasal dari dalam keluarga antara lain: rendahnya pemahaman orang terhadap hak-hak anak, tingkat pendidikan rata-rata sangat rendah, kemiskinan dan berlangsungnya kawin muda.

b. Masyarakat

Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat terhadap hak-hak anak, tingkat pendidikan rata-rata warga masyarakat, kemiskinan, rendahnya kepedulian sosial dan terbatasnya sarana (fasilitas sosial).

c. Organisasi sosial/LSM

Faktor penghambat pada Orsos/LSM adalah (1) sedikitnya orsos?LSM yang menangani anak; (2) terbatasnya sumber dana orsos yang menangani

anak dan (3) masih terbatasnya jumlah LPA.

d. Pemerintah Daerah

Faktor penghambat pada Pemda adalah (1) terbatasnya kemampuan dan sarana; (2) kurang sosialisasi; (3) terbatasnya sumber dana dan (4) kurangnya koordinasi.

5.2 Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang dinilai mendukung upaya perlindungan anak adalah telah adanya gerakan-gerakan masyarakat ke arah upaya perlindungan anak. Gerakan-gerakan masyarakat tersebut dapat dicermati dari berdirinya PSAA, rumah singgah, orsos; tumbuhnya relawan sosial dan dukungan jajaran Pemda tingkat lokal yang cukup besar.

5.3 Peluang

Untuk terselenggaranya upaya perlindungan anak, strategi berbasis masyarakat merupakan suatu alternatif. Sehubungan dengan itu langkah pertama yang perlu ditempuh adalah pemberdayaan LSM yang menyelenggarakan perlindungan anak. Sumber-sumber dan potensi sosial dalam masyarakat perlu terus digali dan dikembangkan secara optimal, yang diikuti dengan penumbuhan relawan sosial.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

Kemiskinan dan buruknya hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat merupakan faktor yang signifikan yang menyebabkan terjadinya masalah penelantaran anak, eksploitasi anak dan perlakuan salah terhadap anak.

Adanya keterbatasan Orsos/ LSM (Lembaga Perlindungan Anak) dalam upaya perlindungan anak, baik dalam aspek organisasi, administrasi maupun teknis pelayanan.

Keterbatasan Pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana, dana, koordinasi dan kapasitas penanganan.

6.2 Saran

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pada berbagai lapisan masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah, legislative maupun yudikatif.
2. Pengembangan jaringan kerja perlindungan anak, yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsure dalam masyarakat, dunia usaha, eksekutif, legislative dan yudikatif.
3. Pemberdayaan Orsos/LSM (Lembaga Perlindungan Anak), terutama dalam keterampilan teknis pelayanan.

PUSTAKA ACUAN

- Carolina Nitimihardjo (1991), *Psikologi Sosial*, Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
Dadang Hawari, "*Kecenderungan*

- Permasalahan Keluarga dalam PJP II : Eksistensi Keluarga dalam Masyarakat Modern dan Industri,"* Jurnal Nomor 40 Tahun 1994, hal 20-32. Bidang Litbang Kesejahteraan Sosial.
- Holil Soelaiman, *"Keluarga dalam Perubahan Sosial Ekonomi yang Cepat dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Sosial"*, Jurnal 40 Tahun 1994 Hal 4-19, Badan Litbang Kesejahteraan Sosial.
- Irwanto (1998), *"Kebutuhan Anak dalam Situasi Sulit"*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Perlindungan Anak, Jakarta.
- Kartini Kartono (1982), *Peranan Keluarga Pemandu Anak*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Khairudin (1985), *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Saparinah Sadli (1980), *"Keluarga sebagai Lingkungan Psiko-Sosial"*, dalam Dinas Sosial DKI Jakarta, Usaha Kesejahteraan Sosial, Sinas Sosial DKI Jakarta.
- Singgih D. Gunbarsa (1992), *Psikologi Perkembangan*, PT BPK Gunung Agung : Jakarta.
- Soetarso (2000), *"Pendekatan Pekerjaan Sosial terhadap Anak-anak dalam Situaasi Rentan"*, Makalah disampaikan pada Pertemuan Analisa Hasil Studi Kasus Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial Anak Dini Usia, 23 September 2000, Cisarua - Bogor.
- Suradi (2002), *Perubahan Sosial Budaya : Implikasinya terhadap Kebijakan dan Pelayanan Sosial bagi Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- Susiladiharti dan Dorang Luhpuri (2000), *"Upaya Perlindungan Anak"*, Makalah disampaikan pada Pertemuan Analisa Hasil Studi Kasus Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial Anak Dini Usia, 23 September 2000, Cisarua - Bogor.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- United Nation, *Konvensi Hak Anak*.
- Utami Munandar, *"Meningkatkan Kecerdasan, Kreativitas dan Kemandirian Anak"*, Informasi tentang Anak, Nomor 23, 1995.